



Dua Pejabat DKI Calon Tersangka

Terkait Kasus Korupsi Proyek UPS Rp 330 M

APARAT penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya terus negebut memproses perkara dugaan korupsi APBD Perubahan DKI Jakarta 2014 terkait proyek pengadaan puluhan unit *uninterruptible power supply* (UPS) sebesar Rp 330 miliar ■

SEMENTARA itu, pertemuan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghasilkan kesepakatan. Yakni, diberikannya password *e-budgeting* kepada Ketua DPRD DKI ■

Bahkan polisi berani memastikan setidaknya ada dua pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menjadi tersangka. Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Ajie Indra mengakui pihaknya memang sudah mempunyai calon kuat tersangka kasus dugaan korupsi bernilai ratusan miliar tersebut.

Setidaknya, ujarnya juga, dua pejabat itu menjadi pejabat di Subdin Pendidikan Menengah (Dikmen) DKI saat kasus itu mencuat. Meski Ajie hingga saat ini belum bisa menyebutkan inisial kedua calon tersangka itu. Namun kedua calon tersangka itu kemungkinan besar akan dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Calon kuat tersangkanya ada dua orang, mereka pejabat di Dikmen DKI," cetus Ajie singkat di Markas Polda (Mapolda) Metro Jaya, Kamis (19/3). Menurutnya juga, dari hasil pemeriksaan penyidik sudah bisa disimpulkan ada indikasi kuat terjadinya praktek korupsi dalam proyek pengadaan UPS senilai Rp 5,8 miliar per unit tersebut.

Dua pejabat yang akan menjadi tersangka itu diduga kuat memang terlibat dalam permainan lelang dalam proyek itu. Sebab dari hasil penyidikan, ternyata 49 perusahaan yang memenangkan lelang itu ternyata tidak memenuhi kualifi-

kasi. Dia juga menambahkan, ke-49 perusahaan itu masing-masing hanya mendapat komisi Rp 54 juta karena namanya dipinjam untuk mengikuti lelang tender pengadaan UPS itu.

Jadi jangan heran, bila saat dicari alamat dan nama perusahaan pemenang tender proyek itu tidak pernah ada. "Sudah jelas kedua orang itu terlibat. Tetapi untuk menguatkan dugaan maka kami harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Selain itu, dari 49 perusahaan ini sebenarnya hanya dipinjam pakai nama, padahal mereka tidak memiliki kemampuan teknis dan administrasi untuk mengikuti lelang," ungkap perwira menengah Polri itu lagi.

Ditambahkannya, agar penetapan tersangka tidak dilakukan terpisah atau satu per satu, namun penetapan tersangka dilakukan secara menyeluruh maka semua alat bukti harus dilengkapi dulu. Termasuk memeriksa para saksi sebanyak 73 orang secara marathon, dari 130 orang yang direncanakan akan diperiksa, selanjutnya dilakukan gelar perkara. "Baru ditetapkan tersangkanya," pungkas Ajie.

Senada disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Martinus Sitompul yang menegaskan setidaknya ada dua orang dari pejabat di lingkungan Pemprop DKI Jakarta yang akan menjadi tersangka. "Sabar dululah, kalau sudah memiliki bukti yang kuat, pasti langsung ditetapkan tersangkanya," lontar Martinus.

Padahal Martinus sebelumnya sempat mengatakan kepada sejumlah media massa kalau pekan ini tersangka kasus dugaan korupsi pembelian 49 UPS yang dikirimkan kepada 49 SMA dan MK negeri di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Proyek yang dikirimkan pada Desember itu dananya berasal dari APBD Perubahan DKI 2014:

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar menegaskan kalau pihaknya siap dipanggil polisi untuk

dimintakan keterangannya terkait kasus korupsi dalam proyek pengadaan UPS itu. "Kalau dipanggil, pasti kami datang," tegas anggota dewan yang membidangi pendidikan tersebut.

Dikatakan Hasan, pengadaan UPS itu dilakukan pada tahun 2014 yaitu pada masa DPRD DKI periode 2009-2014. Sedangkan anggota Komisi E DPRD DKI periode 2014-2019 mayoritas adalah pendatang baru. "Untuk periode saat ini yang duduk di Komisi E sebanyak 21 orang, hanya 6 yang orang lama, sisanya pendatang baru," ujar juga politisi Partai Nasdem yang baru menjadi anggota DPRD DKI 2014-2019 tersebut.

Meski Hasan menegaskan kalau dirinya tak tahu menahu proyek pengadaan UPS itu, namun dia tetap bersedia diperiksa polisi. Namun dia berharap polisi menuntaskan dulu pemeriksaan terhadap para pejabat Pemprov DKI dan pihak swasta yang terlibat kasus dugaan korupsi itu, baru menyasar ke legislatif.

"Polda harus periksa eksekutif dulu karena yang mengajukan (proyek itu) eksekutif. Setelah itu baru ketahuan apakah ada oknum (legislatif) yang terlibat," pungkas Hasan.

Untuk diketahui, dua pejabat Pemprov DKI yang menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya adalah mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpas) Pendidikan Menengah Jakarta Barat yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek itu berinisial AU dan mantan Kepala Sudin Dikmen, Jakarta Pusat, ZS yang juga menjadi PPK proyek UPS tersebut. (ind)



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Nama Proyek	: Uninterruptible Power Suply (UPS)
Asal Anggaran	: APBD Perubahan 2014
Nilai Proyek	: Rp 330 miliar
Jumlah Kegiatan	: 49 kegiatan
Harga Satuan	: Rp 5,8 miliar
Peruntukan	: 25 SMA/SMK di Jakarta Pusat dan 24 SMA/SMK di Jakarta Barat
Pemenang Tender	: 49 perusahaan
Penanganan Kasus	: Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya
Jumlah Saksi	: 130 orang
Saksi Diperiksa	: 73 orang
Calon Tersangka	: 2 orang

ANGGA GUMELAR/INDOPOS